

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijaksanaan pemerintah dalam pergantian prinsip sentralisasi menjadi desentralisasi pada masa independensi wilayah di Indonesia menyebabkan pergantian yang lumayan pokok dalam metode penyelenggaraan penguasa, yang berdampak kepada kemajuan pengurusan administrasi khalayak. Dengan terdapatnya penerapan desentralisasi diharapkan tiap wilayah terus menjadi berdaya guna serta efisien dalam menata cara pembangunannya sebab wilayah menemukan pemberian wewenang serta independensi yang besar buat menata kebijakan- kebijakan berarti untuk perkembangan daerahnya (Syarifudin, A. 2014).

Konsep otonomi daerah yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mendasar dalam konsep otonomi daerah tersebut mengenai pengurusan finansial wilayah.

Pengurusan finansial dimaksud, bahwa Pemerintah Daerah diberikan wewenang dalam mengelola keuangan daerah dan menghasilkan laporan keuangan yang bersifat transparansi dan memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas yang kuat diperlukan dalam pengelolaan keuangan (ran, Yen Thi, Nguyen Phong

& Hoang, Trang Cham, 2020), (Mardiasmo, 2006). Perwujudan akuntabilitas dan transparansi dilihat dari laporan keuangan yang disajikan (Kementerian Keuangan RI, 2018).

Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya (Mardiasmo, 2006). Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan (Yadiati, Wiwin & Mubarak., Abdulloh. 2017). Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan berkualitas harus memenuhi karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dipahami (P. R. Indonesia, 2010). Karakteristik laporan keuangan yang berkualitas meliputi relevansi (*relevance*), penyajian jujur (*faithfull representation*), dapat dibandingkan (*comparability*), ketepatan waktu (*timelines*), dapat diverifikasi (*verifiability*), dan dapat dipahami (*understandability*) (Yadiati, Wiwin & Mubarak., Abdulloh. 2017).

Kualitas laporan keuangan dapat pula dilihat dari sudut pandang auditor yang memberikan opini tentang penyajian laporan keuangan suatu organisasi. Laporan audit dilampirkan pada laporan keuangan tahunan mengandung informasi

yang berguna dan berhubungan dengan kepatuhan entitas terhadap standar akuntansi (Sari, Maya. 2015).

Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) (Sari, 2015). Berdasarkan audit BPK-RI yang dilaksanakan diperoleh bahwa kualitas Laporan Keuangan Daerah dari tahun ke tahun semakin menurun (Brodjonegoro, 2009). Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tercermin dari hasil pemeriksaan BPK-RI (Ratifah & Ridwan, 2012). Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI untuk laporan keuangan Kota Pematangsiantar, disajikan pada tabel di bawah ini:



Sumber: (BPK-RI, 2020)

Gambar 1.1. Opini Kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar (LKPD)

Berdasarkan tabel di atas hasil pemeriksaan BPK-RI mengenai laporan keuangan Kota Pematangsiantar, dimana hasil penilaian BPK-RI diperoleh bahwa kualitas laporan keuangan kota Pematangsiantar mengalami penurunan. Dimana

Pemerintah Kota Pematangsiantar mendapatkan opini (Wajar Dengan Pengecualian) WDP selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2018 an 2019. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Kota Pematangsiantar belum sepenuhnya berkualitas. Peningkatan jumlah anggaran setiap tahunnya meningkatkan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya (Suarmika & Suputra, 2016).

Salah satu hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan sistem informasi keuangan daerah. Laporan keuangan yang menggunakan sistem akan menghasilkan keakurasian angka-angka pada pelaporan tersebut (Zeyn, 2012). Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Tujuan penerapan SIKD diantaranya membantu kepala daerah menyusun anggaran dan laporan pengelolaan keuangan daerah, merumuskan kebijakan keuangan, mengevaluasi kinerja keuangan, menyediakan kebutuhan statistik keuangan, menyajikan informasi secara terbuka kepada masyarakat dan mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD nasional. Beberapa sistem informasi akuntansi tersebut, diantaranya :

Tabel 1.1
Daftar Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

No	Nama Aplikasi	Pembuat	Pengguna	%
1	Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	BPKP	369	68%
2	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Kemendagri	92	17%
3	Sistem Informasi Anggaran dan Keuangan Daerah (SIMAKDA)	PT MSM	27	5%
4	E-Finance	PT STI	11	2%
5	SIMRAL	BPPT	5	1%
6	Sistem Lainnya	-	38	7%
Total			542	100%

Sumber : Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui penggunaan sistem informasi keuangan pemerintah daerah, dimana sistem informasi yang banyak digunakan ialah SIMDA sebanyak 369 atau 68%, dan SIPKD sebanyak 92 atau 17%, SIMAKDA sebanyak 27 pengguna atau 5%, E-Finance sebanyak 11 pengguna atau 2%, SIMRAL sebanyak 5 pengguna atau 1% dan sistem lainnya sebanyak 38 pengguna atau 7%.

Fenomena atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang menyangkut tentang kelemahan sistem informasi dan pelaporan masih sangat beragam. Pemerintah Daerah diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan sistem informasi keuangan agar dapat berjalan dengan efektif sehingga pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pada penerapan sistem informasi keuangan daerah terdapat beberapa temuan kelemahan sistem menyangkut proses penyusunan serta keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut terlihat dari hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2019 ditemukan 5.175 kelemahan SPI yang terdiri atas 1.729 (33%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.338 (45%)

permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.108 (22%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 2020 (www.bpk.go.id)).

Sistem akuntansi akan efektif dijalankan bila didukung oleh sistem pengendalian intern (Sari, 2015). Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi (Mahmudi (2010). Keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat ditentukan oleh baik atau tidaknya pengendalian intern yang berlaku dalam pemerintahan (Mulyadi, 2008).

Dengan mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan pengendalian intern semakin efektif sehingga dapat memediasi dalam mengatasi permasalahan rendahnya kualitas informasi keuangan (Syarifudin, 2014). Sistem pengendalian intern akan sangat efektif bila pengendalian tersebut menyatu dengan infrastruktur dan merupakan bagian penting bagi organisasi (Susanto, 2008). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaiia resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan dan pengendalian intern (Peraturan Pemerintah Nomor 60, 2008).

Hasil temuan BPK-RI tentang permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern yang disajikan, sebagai berikut:



Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 2020 (www.bpk.go.id)

Gambar 1.2. Kelemahaan Sistem Pengendalian Intern

Dari gambar di atas, dilihat bahwa dari hasil IHPS semester 1 tahun 2020 diperoleh bahwa kelemahan sistem pengendalian intern paling banyak menjadi temuan dengan sebanyak 50%. Permasalahan kelemahan SPIP merupakan hal yang vital dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, agar mendapat laporan keuangan yang berkualitas. SPIP yang baik dalam suatu pemerintahan akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik pula, sehingga akan memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya pengamanan aset Negara dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah, dalam hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah (Syarifudin, 2014).

Pengelolaan keuangan daerah juga harus diikuti dengan sumber daya aparatur yang berkompeten (Humairoh, 2013). Sumber daya manusia yang kompeten merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam

pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien (Indriasih, 2014). Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang pedoman perumusan standar kompetensi teknis pegawai negeri sipil menjelaskan standar kompetensi teknis merupakan kemampuan kerja setiap PNS yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan fungsi pekerjaannya.

Laporan Keuangan daerah hingga saat ini juga masih mengalami kendala dalam proses penyusunannya. Permasalahan yang paling mendasar dalam penyusunan laporan keuangan adalah SDM (Sumber Daya Manusia) pada masing-masing OPD, dalam hal ini adalah aparatur daerah. Kenyataannya, beberapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan keuangan bukanlah orang yang berlatar belakang Pendidikan akuntansi. Hal ini menjadi kendala bagi pihak aparatur daerah dalam penyusunan laporan keuangan.

Namun sudah menjadi permasalahan umum di instansi pemerintah daerah bahwa untuk penataan personil, sering kali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas (cakap). Dari aspek kualitas penataan personil tidak mengikuti prinsip “the right man on the right place” (Fikri dkk, 2015).

Kompetensi aparatur merupakan faktor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas (Indriasih, 2014). Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dan dapat berjalan efektif tentunya diperlukan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan (Fikri dkk, 2015). Dalam penyiapan dan penyusunan laporan

keuangan yang berkualitas memerlukan SDM yang memiliki kompetensi serta yang menguasai akuntansi pemerintahan (Humairoh, 2013).

Selain hal tersebut faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas keuangan adalah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor (Mahmudi, 2016). Menurut Siregar, Baldrice (2015), standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Dengan berpedoman pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Seseorang dikatakan paham terhadap standar akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemahaman standar akuntansi pemerintahan merupakan pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku umum dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sehingga dapat memberikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan teknologi

informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien (Jogiyanto, 2011).

Teknologi informasi merupakan perangkat keras bersifat organisatoris dan meneruskan nilai-nilai sosial dengan siapa individu atau khalayak mengumpulkan, memproses, dan saling mempertukarkan informasi dengan individu atau khalayak lain (Efendi et al., 2017). Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhirandata, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Objek dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Kota Pematangsiantar, yang merupakan salah satu kotamadya di Provinsi Sumatera Utara. Pematangsiantar berada di tengah-tengah wilayah kabupaten Simalungun dengan luas wilayah 79,9706 km² dan terletak di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah, Kompetensi sumber daya manusia, dan pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. dengan subjek penelitian pada Pemerintah Kota Pematangsiantar.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kota Pematangsiantar mendapatkan opini WDP yang diberikan oleh BPK terhadap audit atas laporan keuangan pemerintah daerah sebanyak 2 (dua) tahun berturut-turut
2. Penggunaan sistem informasi keuangan daerah belum maksimal.
3. Penyajian akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP sehingga mempengaruhi pemberian opini oleh BPK.
4. Kurangnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan Laporan Keuangan
5. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah masih belum transparan
6. Kelemahaan sistem pengendalian intern ditemukan sebanyak 49,48% dari total temuan.
7. Kurangnya hardware komputer pada masing-masing OPD

8. Adanya temuan BPK pada aspek sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sistem pengendalian pelaksanaan anggaran dan belanja, dan struktur pengendalian intern

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas maka penulis membatasi penelitian pada, ruang lingkup penelitian pada Pemerintah Kota Pematangsiantar. Variabel penelitian kualitas laporan keuangan kota Pematangsiantar, efektivitas penerapan sistem informasi keuangan kota Pematangsiantar, sistem pengendalian intern pemerintah kota Pematangsiantar, kompetensi sumber daya manusia pemerintah kota pematangsiantar, pemahaman standar akuntansi pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi pemerintah kota pematangsiantar. Analisis dan sumber data diperoleh berdasarkan data sekunder dan primer (hasil dari wawancara dan kuisisioner yang dilakukan peneliti).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan
2. Apakah ada pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Apakah ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

4. Apakah ada pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
5. Apakah ada pemahaman teknologi informasi mampu memoderasi hubungan efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan.
6. Apakah ada pemahaman teknologi informasi mampu memoderasi hubungan sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangan
7. Apakah ada pemahaman teknologi informasi mampu memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan
8. Apakah ada pemahaman teknologi informasi mampu memoderasi hubungan pemahaman standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menguji :

1. Pengaruh efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

5. Pemahaman teknologi informasi dalam memoderasi hubungan efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan.
6. Pemahaman teknologi informasi dalam memoderasi hubungan sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangan
7. Pemahaman teknologi informasi dalam memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan
8. Pemahaman teknologi informasi dalam memoderasi hubungan pemahaman standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan juga pengetahuan bagi peneliti dan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemerintah, ketersediaan anggaran, efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemerintah, ketersediaan

anggaran, efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan hal-hal dimaksud sehingga nantinya diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas guna pencapaian *good governance*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah bacaan ilmiah bagi mahasiswa Universitas Negeri Medan terkhusus kepada Prodi Magister Akuntansi, sebagai acuan dan pertimbangan dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya

